

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilihan umum (PEMILU) yang terjadwal dan berkala. Oleh karenanya, tanpa terselenggaranya Pemilu maka hilanglah sifat demokratis suatu negara. Demikian pula, agar sifat negara demokratis tersebut dapat terjamin oleh adanya PEMILU, maka penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara berkualitas. Menurut perspektif pengelolaan negara bangsa (*nation state*) pluralisme menjadi bagian elemen terpenting dalam pemerintahan yang menjunjung tinggi supremasi hukum (*lawe nforcement*) dan dapat terpenuhinya prasyarat *the rule of law*. isu demokratisasi merupakan sesuatu yang strategis dan fungsional untuk menjawab persoalan bangsa (Wibowo, 2022).

Menurut Antony Giddens, demokrasi pada intinya adalah suatu sistem politik dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi bukanlah raja atau bangsawan. Di Indonesia sendiri, demokrasi (demokratisasi) bagi sebagian kalangan dipersepsikan secara beragam. Secara horizontal, demokrasi dan Islam mengajarkan tentang pluralisme, yaitu semangat hubungan yang menghargai perbedaan dan melewati batas-batas etnis, agama, daerah, bahasa, dan unsur-unsur primordial lainnya (Wardhana, 2022).

Secara vertikal, demokrasi mengajarkan bahwa relasi pemerintah dengan rakyat atau antara elite dengan massa bukan berdasar kepada prinsip kewarganegaraan (Nurgiansah 2022).

Dalam Negara yang menganut sistem demokrasi, kampanye politik menjadi sangat penting dalam memperkenalkan kandidat kepada masyarakat. Kampanye politik dipahami sebagai upaya terorganisir yang berusaha mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kelompok tertentu. Dengan tujuan untuk memenangkan Pemilihan Umum tertentu, maka setiap calon perlu mempertimbangkan strategi dan perencanaan yang matang. Strategi dan perencanaan ini sangat penting karena menentukan kemenangan calon dalam proses pemilu. Dalam mempersiapkan pemilihan, sangat umum kita ketahui masing-masing kandidat mempersiapkan ‘pertandingan politik’ mengingat calon pemimpin biasanya lebih dari satu. Masing-masing berlomba-lomba untuk memenangkan pemilihan umum (Fatimah, 2018).

Mereka berusaha untuk menarik perhatian pemilih untuk memilih mereka. Sebagai bentuk atau praktek demokrasi, suara pemilih tentu menentukan kemenangan. Singkatnya, semakin banyak suara atau dukungan yang didapat, maka ia akan memenangkan pemilu. Dengan demikian, selanjutnya si pemenang akan mendapatkan kursi kekuasaan dalam pemerintahan. Dalam beberapa kasus memang kadang kita melihat adanya proses kampanye yang tidak sehat. Penggunaan cara-cara radikal yang barangkali karena adanya salah paham atau sebab lain kadang terjadi. Meski demikian, jumlahnya relatif kecil.

Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), H.Iskandar dan Dja'far Shodiq membeberkan visi misinya untuk diwujudkan lima tahun mendatang. kembali terpilih bersama masa jabatan 2018-2024, “Pembangunan harus hadir di tengah masyarakat, karena ketika saya di pilih ada harapan dari masyarakat. Untuk itu kami pastikan pembangunan bukan sekedar slogan,” ujarnya. Iskandar melanjutkan, penyampaian visi dan misi ini merupakan tonggak untuk menyempurnakan apa yang belum dilaksanakan pada periode sebelumnya. Di awal masa jabatannya yang kedua, ia menegaskan, semua masyarakat Ogan Komering Ilir adalah sama. “Apapun dia, siapapun dia, bagaimana dia, dan dalam keadaan apapun dia. Sama, tujuannya adalah memajukan Ogan Komering Ilir,” kata Iskandar. “Filosofi ini semua kemudian akan berpijak pada landasan ketuhanan yang Maha Esa dengan iman dan taqwa,” sambungnya. Pemaparan visi dan misi tersebut, H.Iskandar SE yang didampingi wakilnya, H.M.Dja'far Shodiq secara bergantian memaparkan poin-poin misi yang akan mereka usung mulai dari tata kelola pemerintahan, infrastruktur, ekonomi, pendidikan, hingga sosial dan Budaya (kaboki.go.id)).

“Kemenangan kami di Pemilihan Kepala Daerah lalu merupakan kemenangan bagi seluruh warga Ogan Komering Ilir. Mari kita bersatu untuk mewujudkan program kami yakni mewujudkan Ogan Komering Ilir Mandira (Maju, Mandiri dan Sejahtera),” kata Iskandar. Sedangkan Dja'far Shodiq menambahkan, sebagai wakil, dirinya tentu sangat mendukung dan akan membantu mewujudkan program bupati sesuai dengan visi dan misi yang

telah disampaikan kepada seluruh warga Ogan Komering Ilir (radarsriwijaya.com).

Sudah bertahun-tahun akses jalan di beberapa desa yang menjadi akses perekonomian warga di kawasan tersebut tidak tersentuh pembangunan. Padahal waktu Pemilihan Kepala Daerah, Bupati Ogan Komering Ilir saat ini berjanji akan memperbaiki akses jalan rusak, membangun dari desa ke desa tapi itu hanya janji belaka tidak ada perubahan kami hanya menikmati jalan rusak parah. Janji ini tidak pernah terealisasi meskipun sudah menjabat 9 tahun (sumselnews.co.id).

Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) H. Iskandar S.E dan Dja'far Shodiq melaksanakan Program-program yang disusun dengan menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan rakyat Kabupaten OKI. telah menyusun sebuah produk politik yang berisi janji-janji kepada masyarakat, tentu saja janji-janji tersebut terkandung sebuah nilai berupa nilai harapan oleh rakyat di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menginginkan perubahan yang lebih baik kedepannya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (LINDA 2020).

Sebenarnya, ingkar janji dalam politik bukan hanya fenomena khas Indonesia. Di beberapa negara lain pun hal ini juga terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Susan C. Stokes (2001), seorang guru besar Ilmu Politik Universitas Chicago terhadap 44 kasus pemilihan presiden di 15 Negara Amerika Latin selama kurun waktu 1982-1995 menunjukkan adanya kecenderungan pengingkaran yang cukup tinggi atas janji-janji kampanye. Ada gejala bahwa para politisi memang berusaha mengambil hati para

pemilih ketika berkampanye, tetapi segera setelah mereka terpilih mereka menentukan kebijakan semau mereka tanpa mempedulikan preferensi para pemilihnya. Pemilu sebagai kontrak sosial tentulah menjamin hak dan kewajiban pemilih di satu pihak dan hak serta kewajiban para pemimpin di pihak lainnya (Sanit, 2004).

Dengan demikian, secara moral, janji adalah sesuatu yang seharusnya secara sungguh-sungguh dipegang untuk kemudian direalisasikan menjadi kenyataan, bukan sebaliknya hanya menjadi instrumen pencitraan diri untuk meraih simpati rakyat. Faktanya, kewajiban moral tersebut tidak benar-benar membentuk komitmen para wakil terpilih untuk mewujudkan janjinya. Sebab itu, perlu ada strategi guna memastikan janji tersebut ditepati. Dalam perspektif hukum Hukum Tata Negara, abai terhadap janji yang berdimensi hukum dapat menjadi alasan untuk meminta pertanggungjawaban para wakil yang bisa saja berujung pada recall untuk anggota legislatif. perspektif hukum Islam Dalam jumbuh Fuqaha menyatakan bahwa menepati janji itu mustahab dan mengingkarinya hukumnya makruh. Kaidahnya pemimpin publik yang ingkar janji termasuk kategori pemimpin yang berdosa (fasiq). Hal ini secara simultan berdampak bahwa dari kadar kefasikan pemimpin akan mempengaruhi kadar ketaatan rakyat kepadanya. didalam hukum Islam, janji ialah termasuk ke dalam sebuah hutang (Sholeh 2021).

Salah satu tokoh pemikir Islam mengkaji khusus tentang kewajiban kepala daerah adalah imam Al-Mawardi ialah ahli fiqh, ahli ushul fiqh, dan

pakar tafsir Abu Al-Hasan Ali bin Habib Al-Mawardi salah satunya membahas khusus tentang kewajiban kepala daerah diantaranya sebagai berikut: adil, berilmu tinggi, sehat inderawi, sehat organ tubuh, memiliki wawasan mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan, berani melindungi wilayah negara dan melawan musuh, dan nasab berasal dari Quraisy berdasarkan Nash dan Ijma' para ulama (Al Mawardi 2006).

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang “Perspektif Politik Islam terhadap pengingkaran Janji Politik Kepala Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah ini merupakan panduan awal bagi penelitian untuk penjelajah pada objek yang diteliti. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah :

Bagaimana perspektif politik Islam terhadap pengingkaran janji politik kepala daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir?

## **A. Batasan Masalah**

Suatu Penelitian membutuhkan Batasan Masalah dengan tujuan untuk dapat menghasilkan uraian yang sistematis dan tidak melebar (Indriani 2018). Maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah membahas tentang “Perspektif politik Islam terhadap pengingkaran janji politik kepala daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir”.

## **B. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

Untuk mengetahui beberapa perspektif politik islam terhadap pengingkaran janji politik kepala daerah di Kabupaten Ogan Komering

## **C. Manfaat penelitian**

### 1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan serta sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan tinggi dan berharap dapat bermanfaat bagi kajian ilmu politik terutama tentang Pemikiran politik dalam islam, serta pembentukan kebijakan pemerintah.

### 2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis manfaat hasil penelitian ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai kebijakam terhadap kepala daerah agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya dan menepati janjinya pada saat kampanye.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Beberapa penelitian dan Jurnal yang memiliki Keterkaitan karena mengandung isi yang sesuai. Penelitian ini di ambil dari jurnal yang dilakukan

1. Oleh : Riana Susmayanti “Analisis putusan tentang gugatan wanprestasi terhadap pengingkaran janji kampanye oleh presiden terpilih”

Lembaga Pengelolaan Investasi (LPI) menggugat Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (SBY-JK) yang melakukan wanprestasi karena tak mewujudkan janji kampanye pada Pilpres 2004. Beberapa janji kampanye pada Juni 2004 yang gagal direalisasikan hingga tahun 2009, antara lain : Pertumbuhan ekonomi 7,6%, Penurunan angka kemiskinan 17,14% menjadi 8,7%. Komitmen itu kembali ditegaskan pada pidato kenegaraan SBY-JK sebagai presiden dan wakil presiden. Realisasi janji tersebut bertentangan dengan fakta dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan selalu di atas 15%, yaitu 15,9 % (tahun 2005); 17,6 % (tahun 2006); 16,4 % (tahun 2007); dan 15,4% (tahun 2008) atau mencapai 34,9 juta jiwa penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Penggugat menyatakan, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% sehingga SBY-JK belum memenuhi janji kampanyenya dan dikategorikan wanprestasi. Menurut kuasa hukum SBY-JK, tingkat kemiskinan sebesar 15,54% (tahun 2008), turun dari 17,7%(tahun 2005), dan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4%. Dimana Rancangan Kinerja Pemerintah 2010-2014 sudah menurunkan target pertumbuhan ekonomi menjadi 5,5% (Susmayanti 2019).

2. Oleh : Monicha Monicha Angraini, “faktor penyebab kekalahan pasangan Zainal Abidin (incumbent) dan Anshori Djausal dalam pemilihan kepala daerah kabupaten lampung utara tahun 2013”

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang telah diadakan di kabupaten Lampung Utara, salah satunya adalah Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati yang di laksanakan pada 19 September 2013, kekalahan pasangan Zainal Abidin dan Anshori Djausal yang diluar dugaan, pada umumnya memiliki basis massa yang kuat dan mempunyai jaringan politik yang luas, dan dari segi pemerintahan biasanya incumbent memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mempengaruhi staf-staf atau satuan kerja dibawahnya untuk mendukung kembali dalam pemilihan calon bupati yang kedua kalinya. Masyarakat mempunyai penilaian yang valid terhadap incumbent atas apa yang telah diberikan kepada masyarakat selama menjabat. Ketidakpuasan masyarakat atas apa yang telah diberikan Zainal Abidin kepada masyarakat Lampung Utara membuat masyarakat menjatuhkan suara penghukuman (*punishment vote*). Selama menjabat calon incumbent tidak mampu mewujudkan janji-janji politik yang telah terlanjur diumbar ketika masa kampanye dulu, setelah menjabat sering kali calon incumbent mengingkari janji yang menjadikan masyarakat berusaha mencari calon alternatif yang menurut mereka mampu mendengarkan keinginan masyarakat(Angraini 2015)

3. Oleh : Elik Susanto “Independensi Media Tempo dan pengaruh ekonomi Politik dalam praktik strukturasi”

“Janji Tinggal Janji” Publik memahami ilustrasi cover Tempo. Persepsi publik pun muncul lewat ilustrasi dan judul majalah itu, Jokowi dianggap berbohong. Banyak janji yang diucapkan dalam kampanye Pemilihan Presiden 2014 namun setelah 5 tahun memerintah banyak pula yang tidak dilaksanakan. Salah satunya masalah pemberantasan korupsi. Seperti tuduhan sejumlah penggiat anti korupsi bahwa Presiden Jokowi ingkar janji dalam penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Publik mencemaskan masa depan pemberantasan korupsi bila Presiden Jokowi membiarkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang di dalamnya ada upaya pelemahan terhadap lembaga antur asuah (Susanto 2021).

Berdasarkan beberapa Penelitian diatas dapat dilihat perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah dari Segi lapangan, kerangka Teori dan Metodologinya.

#### **F. Kerangka Teori**

Secara spesifik, teori merupakan rangkuman abstrak dari berbagai fenomena yang dikemukakan oleh pengarang untuk menganalisis masalah yang akan diteliti. Hal ini terkait dengan pemecahan masalah yang akan dilihat dalam penelitian. Penelitian ini akan mendeskripsikan, membahas fenomena

dan fakta kebijakan politik, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif dan komparatif.

a) Kekuasaan

Kekuasaan politik mengacu pada kemampuan individu, kelompok, atau lembaga untuk mempengaruhi dan mengendalikan tindakan, keputusan, dan kebijakan politik. Ini melibatkan penggunaan otoritas, kontrol sumber daya, persuasi, atau pengaruh sosial untuk mencapai tujuan politik. Penggunaan kekuasaan politik dapat memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap masyarakat dan sistem politik. Oleh karena itu, etika, akuntabilitas dan pengawasan publik terhadap kekuasaan politik. Penyalahgunaan kekuasaan pada dunia politik yang kerap dilakukan oleh pelaku politik menimbulkan pandangan bahwa tujuan utama berpartisipasi politik hanyalah untuk mendapatkan kekuasaan (Paramita 2011).

b) Kepemimpinan Politik dalam islam

konsep pemimpin politik dalam islam menurut ath-Thabari adalah pemimpin sebagai proses mempengaruhi dalam pemutusan sebuah perkara di antara masyarakat dengan memberikan keputusan-keputusan yang adil, serta tidak mengikuti hawa nafsu dalam memutuskan sebuah perkara, menerima gagasan dan memotifasi masyarakat untuk mendukung serta melaksanakan tujuan bersama. Sedangkan tujuan pemimpin adalah memberikan

perlindungan bagi setiap warga negara, memajukan sector pertanian sebagai kebutuhan pangan masyarakat dan menjaga kedaulatan tanah air dari bangsa asing yang ingin mengambil keuntungan di tanah air. Adapun syarat pemimpin adalah, Islam, tidak punya catatan diskriminatif, mampu bersikap dan berbuat adil, memiliki kemampuan dalam bidangnya, tercatat menjadi panutan dan petunjuk masyarakat dalam penyampaian kebaikan, bisa berlaku bijak dalam pemberian keputusan, mampu bertanggung jawab, serta menegakkan yang hak dan meninggalkan yang bathil(Nurhidayat 2021)

c) Janji Politik

Tanggung jawab negara dalam pembangunan khususnya dalam pemenuhan hak-hak ekonomi dan pembangunan berkeadilan sosial membutuhkan peran kekuasaan negara yang lebih besar dan campur tangan Pemerintah. Urgensi peran negara dan pemerintah dalam hal ini mengingat ketatnya persaingan secara global. Perubahan yang terus bergulir, dipercepat oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan ketatnya tingkat persaingan secara global (Magdalena and Simarmata 2018).

Sejauh ini demokrasi politik masih merupakan cita-cita atau wacana karena dalam kenyataannya belum sungguh-sungguh menyentuh penghayatan kehidupan berbangsa dan bernegara dari

masyarakat di pedalaman, memprihatinkan dan pembangunan jalan yang rusak. pemerintahan daerah yang efektif melalui pemilihan kepala daerah dan masyarakat dibodohi oleh janji politik yang di komunikasikan oleh para calon Pemilihan Kepala Daerah pada saat kampanye (T.Lovinasia 2017).

## **G. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, dengan demikian metode penelitian merupakan cara atau alat yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab serangkaian pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah.

### **a) Metodologi Penelitian**

Berhubungan dengan judul yang diambil penulis, maka digunakanlah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian Kualitatif adalah menganalisa perilaku dan sikap politik yang tidak dapat dikuantifikasikan (Ardiyanto, 2004). Penelitian Kualitatif Deskriptif dilakukan dengan cara menjelaskan berbagai hal yang terjadi sesuai dengan sifatnya yang dinamis dan dapat berubah-ubah (Nurhalizah, 2019).

### **b) Pendekatan Penelitian**

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian Deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang (Noor, 2011). Dalam penelitian deskriptif ini terpusat pada masalah aktual yang ada sebagaimana yang terjadi pada saat penelitian berlangsung.

### c) Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data tertulis, karena dengan data tertulis peneliti dapat diperoleh dari wawancara, jurnal, penelitian, arsip, dan dokumentasi. Sumber.

#### 1) Data Primer

Pada penelitian ini mendapatkan data primer dari hasil olah data buku Al-Mawardi dengan judul “*Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*”

#### 2) Data Skunder

Sumber data sekunder dalam penelitian sama halnya dengan Data Primer yaitu melalui sumber data dokumentasi. Dokumentasi adalah sumber data yang diperoleh melalui dari sumber yang lain yakni catatan dari lembaga atau organisasi, buku, jurnal, arsip, ataupun laporan seseorang. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah buku Al-Mawardi yang berjudul “Pemikiran Politik Islam”, Jurnal Internasional serta kutipan yang terkait yang mendukung data penelitian.

### d). Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- Studi Literature

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang

berguna untuk bahan analisis. Peneliti mengumpulkan data melalui buku “*Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*”.

e). Tehnik Analisi Data

Data yang sudah di kumpulkan kemudian di analisis dengan tujuan untuk memperoleh output dari hasil yang ingin di capai dari proses penelitian. Tahapan selanjutnya yaitu penyajian data, data yang didapatkan dikelola menjadi teks naratif yang tersusun secara sistematis kedalam bagian penting. Dalam analisis data ini data yang di kumpulkan akan diolah dan di analisis untuk dapat di ambil kesimpulan sebagai hasil penelitian ini.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan digunakan untuk mendapat gambaran yang terperinci dan untuk mempermudah isi dari pada skripsi ini, sehingga penulis membagi sistematika penulisan ke dalam 5 bab, yaitu:

1. BAB I : Pendahuluan, pada bab ini pada akan diuraikan latar belakang yang mendasari penelitian, kemudian diidentifikasi masalah melalui rumusan masalah. Termasuk pula dijelaskan tujuan dan manfaat penelitian, lalu terdapat tinjauan pustaka dan kerangka teori sebagai acuan penelitian, serta metode penelitian yang menjelaskan pendekatan, data dan jenis data teknik pengumpulan, teknik analisis data serta sistematika penulisan.
2. BAB II: Kajian Kepustakaan yang relevan, Pada bab ini akan dibahas mengenai teori yang mendukung dalam proses penyusunan penelitian ini. Berisi mengenai pengertian ataupun definisi serta teori-teori yaitu

Kekuasaan, kepemimpinan dalam islam dan janji politik yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari beragam sumber.

3. BAB III : Gambaran Umum Objek Penelitian, pada bab ini penulis menjelaskan tentang kepala daerah dalam politik.
4. BAB IV : : Hasil dan Pembahasan, Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai Perspektif politik Islam terhadap pengingkaran janji politik kepala daerah.
5. BAB V : Penutup pada bab ini penulis menyimpulkan pembahasan mengenai penelitian yang telah dilakukan sekaligus menjadi penutup.